

NEW PUBLIC MANAGEMENT CRITICAL RIVIEW

by Lukman Arif

Submission date: 24-Feb-2023 10:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 2021746641

File name: NEW_PUBLIC_MANAGEMENT_CRITICAL_RIVIEW.docx (61.38K)

Word count: 3179

Character count: 21625

NEW PUBLIC MANAGEMENT CRITICAL RIVIEW

Abstrak

Munculnya berbagai kritik yang ditujukan kepada organisasi sektor publik akhirnya memunculkan gerakan reformasi manajemen sektor publik yaitu konsep New Public Management. Dalam konsep NPM, semua pimpinan atau pengelola didorong untuk dapat menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau memprivatisasi fungsi-fungsi pemerintahan. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif menggunakan pendekatan *systematic riview*. *Systematic riview* adalah metode yang menggunakan bukti berbasis bukti sebelumnya melalui tinjauan, evaluasi, evaluasi terstruktur, klasifikasi dan kategorisasi. Karena Langkah dan strategi untuk melakukan tinjauan sistematis yang terencana dan terstruktur dengan baik, metode ini sangat berbeda dengan metode yang hanya digunakan untuk menyampaikan studi literatur. Berdasarkan hasil analisis telaah yang telah dilakukan, beberapa hal yang menjadi kritik terkait pelaksanaan NPM adalah: 1) desentralisasi dapat berdampak negatif terhadap partisipasi masyarakat, khususnya dalam kebijakan sosial.. 2) Mengacu pada penerapan teknik manajemen dari sektor swasta ke sektor publik. Banyak komentator akademik seperti Pollitt (1990) dan Armstrong (1998) berpendapat bahwa sebagian besar bidang pelayanan publik dan administrasi memiliki dimensi politik, etika, konstitusional, dan sosial yang berbeda, dan faktor-faktor ini membuat sektor publik berbeda dari sektor swasta. 3) Budaya nasional mempengaruhi pelaksanaan NPM. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah budaya nasional, yang berarti NPM bisa sangat cocok untuk reformasi pemerintahan di negara maju, tetapi di negara berkembang, NPM dapat menyebabkan pemerintahan yang lebih korup karena ada kekurangan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas. 4) Permasalahan Kelembagaan Tantangan dalam mengimplementasikan manajemen publik modern di negara itu muncul sebagai akibat dari masalah kelembagaan, kurangnya penegakan hukum, modal, dan kemampuan sumber daya manusia. Terjadi Selain itu, negara-negara berkembang terus menerapkan reformasi yang tidak terkait atau bahkan bertentangan dengan tujuan NPM. Paket pada agenda NPM belum sepenuhnya dieksekusi.

Kata kunci: New Public Management, Critical Riview, Pelayanan public, pemerintahan.

Abstract

The emergence of various criticisms directed at public sector organizations eventually gave rise to a public sector management reform movement, namely the concept of New Public Management. In the NPM concept, all leaders or managers are encouraged to be able to find new and innovative ways to get maximum results or privatize government functions. This research is part of a qualitative research using a systematic review approach. Systematic review is a method that uses previous evidence-based evidence through review, evaluation, structured evaluation, classification and categorization. Because the steps and strategies for carrying out a systematic review are well planned and structured, this method is very different from the method used only to convey literature studies. Based on the results of the analysis that has been carried out, several things that have become critics regarding the implementation of NPM are: 1) decentralization can have a negative impact on community participation, especially in social policies. 2) Refers to the application of management techniques from the private sector to the public sector. Many academic commentators such as Pollitt (1990) and Armstrong (1998) argue that most fields of public service and administration have distinct political, ethical, constitutional, and social dimensions, and that these factors make the public

sector different from the private sector. 3) National culture influences the implementation of NPM. Another factor to consider is national culture, which means that NPMs can be very suitable for governance reform in developed countries, but in developing countries, NPMs can lead to more corrupt governments due to deficiencies in fulfilling the principle of accountability. 4) Institutional Issues Challenges in implementing management Modern society in the country emerged as a result of institutional problems, lack of law enforcement, capital, and human resource capabilities. In addition, developing countries continue to implement reforms that are unrelated to or even contrary to the goals of the NPM. Packages on the NPM agenda have not been fully executed.

Keywords: New Public Management, Critical Review, Public service, government

Pendahuluan

Pada dasarnya tujuan reformasi adalah untuk meningkatkan kinerja sektor publik dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Lebih luas lagi, ini merupakan wujud dari keinginan menuju good governance. Penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan sangat penting karena secara langsung dapat memberikan petunjuk yang jelas dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab serta memungkinkan pengelolaan perusahaan yang lebih aman sehingga dapat meningkatkan nilai dan kepercayaan mitra atau masyarakat (Kristanto et al., 2021). Akhir-akhir ini, organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, berkualitas rendah, dan kurang inovasi atau kreativitas. Munculnya berbagai kritik yang ditujukan kepada organisasi sektor publik akhirnya memunculkan gerakan reformasi manajemen sektor publik yaitu konsep New Public Management. Dalam konsep NPM, semua pimpinan atau pengelola didorong untuk dapat menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau memprivatisasi fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi memimpin dengan menyapu semua pekerjaan (mendayung), tetapi dengan “mengarahkan” yang artinya mengendalikan, memimpin, dan juga mengarahkan hal-hal yang strategis saja (Sri Hartati, 2020).

Konsep New Public Management merupakan salah satu yang ditawarkan dalam pengelolaan kegiatan sector public di Indonesia. Istilah New Public Management, dikenal pada tahun 1980-an, yang mengalami beberapa kali perubahan dan kemudian populer kembali sekitar tahun 1990-an. Hal ini dimaknai sebagai alternatif dalam mengelola organisasi sektor publik yang selama ini dinilai kurang berhasil (Hening & Kumara, 2019). Secara umum, perubahan penerapan New Public Management bertujuan untuk: (1) meningkatkan efisiensi di sektor publik, (2) meningkatkan daya tanggap lembaga sektor publik terhadap klien (masyarakat), (3) meningkatkan akuntabilitas di sektor publik, dikemukakan oleh (Business, 2020) Sasaran utama model New Public Management adalah pengorganisasian dan penekanan pada ekonomi dan efisiensi unit pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan public. New Public Management sebagai variabel moderasi. Mendemonstrasikan sistem pengukuran kinerja dengan jenis pemantauan dan pemusatan yang secara langsung mempengaruhi kinerja organisasi. Dalam nada yang sama mencatat bahwa NPM telah membawa manfaat efektivitas biaya dan efektivitas layanan untuk manajemen publik, serta peningkatan efisiensi dan nilai uang dengan berfokus pada manajemen kinerja dan audit. Pengamat lain juga percaya bahwa NPM mendorong pemerintah untuk fokus pada produksi layanan berkualitas yang efisien. Selain itu, NPM menggantikan struktur organisasi hierarkis yang sangat terentralisasi dengan manajemen terdesentralisasi karena NPM melibatkan restrukturisasi dan perampingan sektor

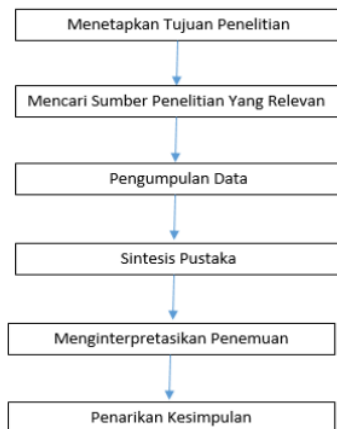
publik, termasuk reorganisasi dan perampingan layanan sipil pusat (Minogue, 2001b). Kritik baru manajemen public.

NPM memiliki tiga komponen utama, yaitu insentif, kompetisi, dan disagregasi. Insentif menekankan pada sistem pembayaran berbasis kinerja dan kontrak mandat. Insentif juga berkorelasi dengan meritokrasi, sebagai cara mendistribusikan pendapatan, kekuasaan, kekayaan, kesempatan, kehormatan, dan pengakuan sosial berdasarkan apa yang pantas mereka terima (David & Foray, 2020) di Indonesia, pendekatan New Public Management (NPM) yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. NPM adalah suatu pendekatan yang berusaha mengubah birokrasi yang kaku, lambat, dan tidak efisien dengan mengimpor konsep, teknik, dan nilai bisnis swasta, sehingga pemerintah dapat memberikan layanan yang efektif kepada warga, dan juga menekankan efisiensi (EGAWATI, 2022). (Business, 2020) menyatakan bahwa NPM telah menjalankan tugasnya dan berbagai elemen NPM dihentikan atau ditarik dengan cepat. Sebaliknya, mereka melihat DEG sebagai alternatif utama dan mencirikannya dengan tiga elemen, yaitu: 1) Reintegrasi mencakup pengembalian dari institusi, pemerintahan bersama, pemerintahan ulang, pemulihan proses sentral, pengurangan biaya produksi secara radikal, rekayasa ulang fungsi kantor, mengonsentrasikan pengadaan dan spesialisasi, serta penyederhanaan jaringan; 2) Holisme berbasis kebutuhan termasuk reorganisasi berbasis klien atau berbasis organisasi, misalnya, pencarian dan pertanyaan informasi interaktif, pergudangan data, rekayasa ulang layanan ujung ke ujung, dan proses pemerintah yang gesit; 3) Proses digitalisasi termasuk pengiriman layanan elektronik, bentuk baru dari proses otomatis, disintermediasi radikal, streaming saluran aktif, memfasilitasi administrasi isokratik dan produksi bersama, dan bergerak menuju tata kelola buku terbuka. Akan tetapi dalam praktik pengelolaan NPM, setiap negara ataupun Lembaga yang menjalankan masih mengalami berbagai masalah. Penelitian ini akan menjelaskan tentang kritik terhadap pelaksanaan NPM.

13

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif menggunakan pendekatan *systematic rievew*. *Systematic rievew* adalah metode yang menggunakan bukti berbasis bukti sebelumnya melalui tinjauan, evaluasi, evaluasi terstruktur, klasifikasi dan kategorisasi. Karena Langkah dan strategi untuk melakukan tinjauan sistematis yang terencana dan terstruktur dengan baik, metode ini sangat berbeda dengan metode yang hanya digunakan untuk menyampaikan studi literatur (Sugiyono, 2016). *Systematic rievew* adalah jenis sintesis bukti di mana pertanyaan penelitian yang luas atau sempit dirumuskan, dan data yang berhubungan langsung dengan pertanyaan tinjauan sistematis diidentifikasi dan disintesis. Data dikumpulkan melalui rievew literatur penelitian sebelumnya. Kemudian, disimpulkan melalui penalaran deduktif (umum ke khusus). Tinjauan literatur adalah pendekatan sistematis dari studi sebelumnya yang terkait dengan pertanyaan penelitian, baik dalam lingkup luas maupun sempit. Ada beberapa penelitian dan kajian sebelumnya tentang NPM yang dapat digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder. Berikut akan digambarkan alur penelitian ini.



Hasil Penelitian

Kritik baru manajemen publik: Meskipun gagasan tentang NPM telah menyebar secara internasional dan banyak negara telah memperkenalkan reformasi yang terkait dengannya, ada beberapa kritik terhadapnya. Sebelum memeriksa kritik-kritik ini, penting untuk ditekankan bahwa NPM bukanlah seperangkat tindakan yang pasti. Beberapa pengamat percaya bahwa NPM paling baik dilihat sebagai menu dari mana pilihan dapat (Van De Walle & Hammerschmid, 2011). Menunya panjang, seperti yang bisa dilihat dari pembahasan di bagian sebelumnya, dan negara yang berbeda membuat pilihan yang kontras yang mengarah pada variasi bentuk NPM yang ditemukan di negara tertentu, beberapa hal yang menjadi kritrik terkait pelaksanaan NPM adalah:

1. menyiratkan paradoks sentralisasi melalui desentralisasi.
Untuk mengilustrasikan hal ini, (Batley, 2004) mencatat bahwa memberikan lebih banyak wewenang kepada administrator publik untuk mengelola program dapat menghasilkan konsentrasi pengambilan keputusan dengan mereka. Oleh karena itu, NPM dapat mengarah pada pengambilan keputusan terpusat oleh administrator publik, alih-alih mempromosikan desentralisasi dalam organisasi publik seperti yang diklaimnya. desentralisasi kemitraan dan jaringan. Dalam strategi ini, NPM disertai dengan proses desentralisasi dan devolusi sesuai dengan prinsip subsidiaritas vertikal, dimana lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat dianggap mampu meringkai masalah dan mengimplementasikan solusi. Namun, jika bukan kewirausahaan, desentralisasi dapat berdampak negatif terhadap partisipasi masyarakat, khususnya dalam kebijakan sosial. (Christensen, 2010) Di sisi lain, risiko sosial dapat didelegasikan tanpa sumber daya yang memadai. Dalam hal membangun jaringan, perlu difokuskan pada kemitraan, jaringan, layanan bersama, dan cara baru untuk bekerja sama. Selain itu, diperlukan kemitraan publik-swasta, di mana sektor publik dan sektor swasta berbagi risiko sumber daya yang masuk untuk menghasilkan nilai lebih bagi keuntungan kedua sektor. Kemitraan untuk aksi publik telah ada sejak lama, dan banyak contoh sejarah kemitraan dapat dikutip.
2. Mengacu pada penerapan teknik manajemen dari sektor swasta ke sektor publik. Sementara NPM telah mendorong penggunaan teknik manajemen sektor swasta, mungkin ada risiko yang terkait dengan penerapan beberapa praktik sektor swasta

(Erlie, 2005). Banyak komentator akademik yang berpendapat bahwa sebagian besar bidang pelayanan publik dan administrasi memiliki dimensi politik, etika, konstitusional, dan sosial yang berbeda, dan faktor-faktor ini membuat sektor publik berbeda dari sektor swasta. Pandangan pelengkap diberikan (Savoie, 2002), yang berpendapat bahwa NPM pada dasarnya cacat karena praktik manajemen sektor swasta jarang diadopsi dalam operasi pemerintah. Bagi mereka, NPM tidak sesuai untuk sektor publik karena memiliki tujuan yang lebih kompleks, tanggung jawab yang lebih rumit, dan lingkungan politik yang lebih bergolak daripada sektor swasta. Selain itu, hubungan antara pengurus. Karakteristik dan komponen utama NPM yang biasanya menekankan pada efisiensi, bahkan solusi yang inovatif, dapat bekerja dengan baik dalam bisnis swasta amun, selain memiliki pemerintahan yang efisien dan inovatif, pemerintah dan sektor publik juga perlu memikirkan nilai-nilai publik, seperti keadilan, keadilan, keterwakilan, dan partisipasi, merupakan nilai-nilai penting yang ingin dicapai (Kirana & Majid, 2022) Pemerintah yang berorientasi pasar sering menggunakan struktur pasar swasta untuk menyelesaikan masalah daripada proses administrasi, seperti pemberian layanan atau administrasi dan kontrol melalui undang-undang. Dengan Memberikan insentif fiskal, misalnya, sehingga perusahaan swasta atau anggota masyarakat berperilaku dengan cara ini berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial.

3. Budaya nasional mempengaruhi pelaksanaan NPM .

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah budaya nasional, yang berarti NPM bisa sangat cocok untuk reformasi pemerintahan di negara maju, tetapi di negara berkembang, NPM dapat menyebabkan pemerintahan yang lebih korup karena ada kekurangan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas. (Winarno & Retnowati, 201) Bahkan menurut , NPM dapat menyebabkan hasil yang tidak adil yang terjadi karena desentralisasi . Selain itu, pemerintah perlu memulai komunikasi dua arah untuk membangun pemerintahan digital di Indonesia karena partisipasi masyarakat diyakini sebagai inti dari pemerintahan digital. Dalam mengembangkan pemerintahan digital, pemerintah Indonesia perlu mulai melibatkan masyarakat dalam perancangannya, sehingga platform tidak hanya dibangun dari sudut pandang pemerintah saja. Pemerintah dapat mencoba pendekatan bottom-up karena bekerja dari warga, bisnis, dan pemangku kepentingan, juga memungkinkan lebih banyak interaksi, eksperimen, dan tawar-menawar untuk apa yang dibutuhkan di bagian bawah (Mamuko & Adnan, 2021).

(Andrews, 2003) mengamati 'ketidakcocokan budaya administrasi' yang mempengaruhi implementasi reformasi yang dikembangkan Barat di masyarakat Barat dan Asia. Dia menunjuk pada perbedaan dalam nilai-nilai budaya di mana masyarakat Barat diwakili oleh nilai-nilai seperti individualisme, kepentingan pribadi utilitarian, orientasi pencapaian, dan masyarakat Asia dengan nilai-nilai seperti nilai keluarga kolektif, koneksi masyarakat, senioritas dan timbal balik. Penelitian yang dilakukan oleh juga menyoroti pentingnya 'hubungan interpersonal' dalam konteks Asia, khususnya dalam masyarakat yang dipengaruhi Konfusianisme (seperti Cina dan Vietnam) di mana hubungan profesional dan pribadi diintegrasikan melalui interaksi sosial (seperti kunjungan rumah, bersantap pemberian hadiah). Peningkatan rujukan budaya ke analisis reformasi manajemen publik hanyalah fenomena baru-baru ini. Ini tidak selalu terjadi, dan sebelumnya budaya hanya digunakan dalam pengertian

preskriptif atau retorik (Borins, 2003) setuju bahwa sementara ada beberapa interlinkage antara budaya dan manajemen publik, itu tidak secara sistematis dan eksplisit dimasukkan dengan merujuk pada teori yang memadai. Mereka berpendapat bahwa dalam ilmu sosial empiris konsep budaya berupaya menjelaskan perbedaan dalam perilaku beragam kelompok aktor dalam situasi yang secara objektif sama. (Batley, 2004) menawarkan visi berlapis budaya, yang terdiri dari pendekatan makro, meso, mikro dan nano dalam perspektif reformasi sektor publik. Pendekatan ini terutama berbeda dalam apa yang mereka gunakan sebagai unit analisis. Pada tingkat makro, unit analisis adalah masyarakat, di tingkat meso itu adalah administrasi dan profesional, di tingkat mikro itu adalah organisasi dan di tingkat nano itu adalah kantor di dalam organisasi atau kelompok pekerjaan tertentu. Makalah ini meneliti budaya dari perspektif makro dan meso untuk memeriksa budaya Bhutan. Modul Survei Nilai Geert Hofstede (VSM), yang menggunakan teori dan psikolog organisasi.

4. Permasalahan Kelembagaan

Tantangan dalam mengimplementasikan manajemen publik modern di negara itu muncul sebagai akibat dari masalah kelembagaan, kurangnya penegakan hukum, modal, dan kemampuan sumber daya manusia. Terjad Selain itu, negara -negara berkembang terus menerapkan reformasi yang tidak terkait atau bahkan bertentangan dengan tujuan NPM. Paket pada agenda NPM belum sepenuhnya dieksekusi.

(Hanifah, 2018) Seperti masalah yang terjadi di Indonesia Hasil Evaluasi Kementerian PAN-RB mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses penerapan manajemen kinerja di Indonesia, khususnya ketidakmampuan instansi pemerintah untuk (1) menetapkan tujuan strategis dan berorientasi pada sasaran; (2) menentukan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat pencapaian sasaran/sasaran; (3) menetapkan kegiatan (program dan kegiatan) yang berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil review akuntabilitas kinerja tahun 2016 yang menunjukkan bahwa sangat sedikit entitas pemerintah yang memperoleh peringkat minimal B. (baik). Penilaian B (baik) merupakan nilai minimal untuk kematangan manajemen kinerja di instansi pemerintah. Sejumlah masalah muncul sebagai akibat dari kurangnya pemahaman lembaga pemerintah tentang alasan keberadaan dan komitmen mereka terhadap pertumbuhan. Selain itu, pengetahuan lembaga pemerintah tentang konsep nilai untuk uang, yang merupakan cara hidup untuk anggaran berbasis kinerja yang sangat rendah. Lembaga pemerintah terbiasa dengan paradigma penganggaran garis penganggaran, yang hanya berfokus pada input pembiayaan tanpa mempertimbangkan apakah keuangan input akan menghasilkan output dan hasil yang berdampak pada pembangunan.

Kesimpulan

¹¹ Berdasarkan hasil analisis telaah yang telah dilakukan, beberapa hal yang menjadi kritir terkait pelaksanaan NPM adalah: 1) desentralisasi dapat berdampak negatif terhadap partisipasi masyarakat, khususnya dalam kebijakan sosial. Di sisi lain, risiko sosial dapat didelegasikan tanpa sumber daya yang memadai. Dalam hal membangun jaringan, perlu difokuskan pada kemitraan, jaringan, layanan bersama, dan cara baru untuk bekerja sama. Selain itu, diperlukan kemitraan publik-swasta, di mana sektor publik dan sektor swasta berbagi risiko sumber daya yang masuk untuk menghasilkan nilai lebih bagi keuntungan kedua sector. 2) Mengacu pada penerapan teknik manajemen dari sektor swasta ke sektor

publik. Banyak komentator akademik seperti Pollitt (1990) dan Armstrong (1998) berpendapat bahwa sebagian besar bidang pelayanan publik dan administrasi memiliki dimensi politik, etika, konstitusional, dan sosial yang berbeda, dan faktor-faktor ini membuat sektor publik berbeda dari sektor swasta. 3) Budaya nasional mempengaruhi pelaksanaan NPM. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah budaya nasional, yang berarti NPM bisa sangat cocok untuk reformasi pemerintahan di negara maju, tetapi di negara berkembang, NPM dapat menyebabkan pemerintahan yang lebih korup karena ada kekurangan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas. 4) Permasalahan Kelembagaan Tantangan dalam mengimplementasikan manajemen publik modern di negara itu muncul sebagai akibat dari masalah kelembagaan, kurangnya penegakan hukum, modal, dan kemampuan sumber daya manusia. Terjad Selain itu, negara-negara berkembang terus menerapkan reformasi yang tidak terkait atau bahkan bertentangan dengan tujuan NPM. Paket pada agenda NPM belum sepenuhnya dieksekusi.

Daftar Pustaka

- Andrews, M. (2003). New public management and democratic participation: Complementary or competing reforms: A South African study. *Int. J. Public Admin*, 26, 991–1015.
- Batley, R. and G. L. (2004). *The Changing Role of Government: The Reform of Public Services in Developing Countries*. Palgrave Macmillan.
- Borins, S. (2003). *New Public Management: North American Style*. In: *The New Public Management: Current Trends and Future Prospects*, McLaughlin, K., S.O. Osborne and E. Ferlie (Eds.).
- Business, C. (2020). *Performance-based budgeting implementation in higher education institutions : Determinants and impact on quality* *Performance-based budgeting implementation in higher education institutions : Determinants and impact on quality*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1786315>
- Christensen, T. and P. L. (2010). *New public management: The effect of contractualism and devolution on political control*. *Public Manage*. 3, 73-94.
- David, M. E., & Amey, M. J. (2020). New Public Management. *The SAGE Encyclopedia of Higher Education*, 4–22. <https://doi.org/10.4135/9781529714395.n407>
- EGAWATI, A. (2022). the Impact of New Public Management Approach Toward Digital Government in Indonesia. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 24, 55–61. <https://doi.org/10.47743/jopaf-2022-24-05>
- Erlie, E. and P. S. (2005). *Changing developments in NPM*. *Int. J. Public Admin*. 25, 1459-1469.
- Hanifah, S. F. dan U. N. (2018). <http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/434-permasalahan-manajemen-kinerja-di-indonesia-dan-upaya-kementerian-panrb-untuk-mengatasinya>. <http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/434-permasalahan-manajemen-kinerja-di-indonesia-dan-upaya-kementerian-panrb-untuk-mengatasinya>
- Hening, P., & Kumara, G. H. (2019). Public Sector Transformation in the Digital Age: Obstacles and Challenges for the Government of Indonesia. *Iapa Proceedings Conference, January 2019*, 75. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.223>

- Kirana, N. W. I., & Majid, N. (2022). Challenges of Digital Transformation on Good Governance for Improving Public Services Quality. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 2022, 43–47. <https://doi.org/10.11594/nstp.2022.2307>
- Kristanto, S. B., Soniawati, N. I., Hambali, A., & Siregar, S. R. (2021). The Institutionalization of New Public Management (NPM) on Indonesia Healthcare and Social Security Agency. *Proceedings of the Ninth International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2020)*, 174(Icebm 2020), 508–512. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210507.075>
- Mamuko, Y., & Adnan, R. S. (2021). REBRANDING SEBAGAI MANIFESTASI REFORMASI BIROKRASI ERA NEW NORMAL : PERSPEKTIF DIGITAL ERA GOVERNANCE (Studi Implementasi Digital Weberian Bureaucracy (DWB) Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)) REBRANDING AS MANIFESTATION. *Jurnal Civil Service*, 15(1), 71–82.
- Savoie, D. J. (2002). *What is Wrong with the new Public Management. In: Public Management: Critical Perspectives, Osborne, S.P.*
- Sri Hartati. (2020). *PENERAPAN MODEL NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) DALAM REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA*. 8(2), 65–84. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1293>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Van De Walle, S., & Hammerschmid, G. (2011). The impact of the new public management: Challenges for coordination and cohesion in european public sectors. *Halduskultuur*, 12(2), 190–209.
- Winarno, R., & Retnowati, E. (2019). Good Governance Based Public Services. *Jurnal Notariil*, 4(1), 8–17. <http://dx.doi.org/10.22225/jn.4.1.1155.8-17>

NEW PUBLIC MANAGEMENT CRITICAL RIVIEW

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	4%
2	rbkunwas.menpan.go.id Internet Source	3%
3	Submitted to iGroup Student Paper	2%
4	wulandarihastuti.blogspot.com Internet Source	2%
5	Submitted to University of Limerick Student Paper	2%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	Angelina EGAWATI. "THE IMPACT OF NEW PUBLIC MANAGEMENT APPROACH TOWARD DIGITAL GOVERNMENT IN INDONESIA", Journal of Public Administration, Finance and Law, 2022 Publication	1%
8	ojs.uajy.ac.id Internet Source	

1 %

9

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

1 %

10

eprints.umm.ac.id

Internet Source

1 %

11

jurnal.uai.ac.id

Internet Source

1 %

12

repository.uir.ac.id

Internet Source

1 %

13

docplayer.info

Internet Source

<1 %

14

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

15

Rr Tutik Sri Hariyati. "Mengenal Systematic Review Theory dan Studi Kasus", Jurnal Keperawatan Indonesia, 2010

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On